

**REALISASI KINERJA PADA PENYALURAN ZAKAT BAITUL MAL
ACEH MENURUT PP NO. 17 TAHUN 2020
(Perbandingan PNS dan Tenaga Kontrak Pada Beban Kerja)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

LISA SAPUTRI
NIM. 210102213

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**REALISASI KINERJA PADA PENYALURAN ZAKAT BAITUL MAL
ACEH MENURUT PP NO. 17 TAHUN 2020
(Perbandingan PNS dan Tenaga Kontrak Pada Beban Kerja)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

LISA SAPUTRI
NIM. 210102213


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk diuji/di *munaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

UIN
A R - R A N I R Y
جامعة الرانيري


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002


Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
NIP. 198604152020121007

**REALISASI KINERJA PADA PENYALURAN ZAKAT BAITUL MAL
ACEH MENURUT PP NO. 17 TAHUN 2020
(Perbandingan PNS dan Tenaga Kontrak Pada Beban Kerja)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Februari 2025 M
12 Sya'ban 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

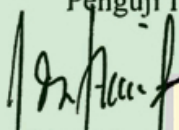
Ketua


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197004261997031002


Sekretaris


Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
NIP. 198604152020121007

Penguji I


Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji II


Faisal Fauzan, M.Si
NIDN. 0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Lisa Saputri
NIM : 210102213
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan inisaya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Lisa Saputri

ABSTRAK

Nama : Lisa Saputri
NIM : 210102213
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Realisasi Kinerja Pada Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh Menurut Pp No. 17 Tahun 2020 (Perbandingan PNS Dan Tenaga Kontrak Pada Beban Kerja)
Tanggal Sidang : 12 Februari 2025
Tebal Skripsi : 104 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, Lc., MA
Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, PNS, Tenaga Kontrak, dan Beban Kerja.

Baitul Mal Aceh memiliki aparatur dari kalangan PNS dan non PNS, yang harus berkolaborasi sebagai '*amil* untuk penyaluran zakat. Namun secara kinerja, status pekerja dari PNS dan non PNS ini memiliki perbedaan kontribusi terutama dari beban kerja, kompensasi, dan tanggung jawab dalam penyaluran zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan tugas dan pekerja di kalangan staf PNS dan non-PNS, untuk meneliti tugas pokok dan fungsi para pekerja pengelolaan zakat dari kalangan ASN dan non ASN apa dibagi sama rata, serta implementasi konsep '*amil* berdasarkan *fiqh* Islam. Metode penelitian riset ini dengan menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, dan jenis penelitian *deskriptif analisis* serta teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tugas bagi PNS dan non-PNS dilakukan melalui rapat kerja yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pimpinan Baitul Mal Aceh, kepala seksi, dan staf operasional, pembagian tugas dilakukan berdasarkan kebutuhan program dan kemampuan masing-masing individu. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan tugas pokok dan fungsi antara ASN dan non-ASN di Baitul Mal Aceh. ASN lebih banyak berperan dalam aspek perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan pengawasan administratif, sedangkan non-ASN lebih terlibat dalam implementasi teknis pada pendistribusian zakat, pendataan mustahiq, serta pengawasan langsung pada pelaksanaan program di lapangan. Dari perspektif konsep '*amil*, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip *fiqh* Islam telah menerapkan manajemen terstruktur dengan pembagian tugas berbasis kompetensi. Setiap personil PNS dan Non PNS penting melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan amanah dalam pengelolaan zakat. Penguatan kompetensi '*amil* dari kalangan PNS dan non-PNS melalui pelatihan dan pengembangan yang berbasis syari'ah perlu menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya yang tiada terhingga. Dengan ridha dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Melalui ajaran beliau, kita diajarkan untuk hidup dengan etika dan akhlakul karimah, sehingga dapat berinteraksi dan hidup berdampingan dalam masyarakat dengan penuh kedamaian dan harmoni ini.

Dengan ini penulis mempersembahkan skripsi yang berjudul **“Realisasi Kinerja Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh Menurut PP No. 17 Tahun 2020 (Perbandingan PNS dan Tenaga Kontrak Pada Beban Kerja)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Proses penusunan skripsi ini tidak lah mudah, banyak lika-liku yang harus dihadapi. Namun dengan semangat dan tekad yang kuat, penulis berusaha untuk harus menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan beban kerja antara PNS dan tenaga kontrak dalam konteks penyaluran zakat, serta, memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, bimbingan, doa, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. Selaku Dekan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. Chairul Fahmi, MA dan ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta seluruh staf yang ada di dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah, atas segala arahan dan dukungan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc., MA, selaku Pembimbing II. Penulis sangat berterimakasih atas bimbingan, kritikan, dan saran yang konstruktif, yang telah membantu penulis dalam Menyusun skripsi ini dengan lebih baik. Jasa dan dedikasi bapak tidak akan pernah penulis lupakan, terimakasih sekali lagi penulis ucapkan semoga Allah memudahkan segala urusan bapak.
4. Kepada teman-teman yang seperjuangan se-angkatan HES-21 yang di warkop MP yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis sangat menghargai kehadiran kalian dalam perjalanan ini yang tak ternilai ini.
5. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. terima kasih atas ilmu dan pengalaman, motivasi, kesan, pesan dan moment yang menjadi bekal berharga bagi penulis dalam dunia yang lebih ekstrem kedepannya.
6. Teristimewa kepada keluarga saya terutama kedua orang tua saya, Ayahanda Hermaidir Bin Arrahman dan ibunda Masyitah Binti Akarim, dari lubuk hati yang paling dalam terima kasih yang tak terhingga kepada bapak dan mami saya. Atas pengorbanan, cinta dan doa yang tiada henti ini, saya tidak akan pernah ada dititik ini. Kalian

adalah tujuan dalam hidup saya untuk selalu bermakna kedepannya. Setiap tetes keringat dan air mata yang kalian curahkan demi masa depan saya adalah pengorbanan yang tidak akan pernah bisa saya balas, dan Kepada saudara-saudari kandung saya, pertama kakak Bella Afrida Yanti S. Pd, kedua abang saya Riza Saputra, ke empat adek cowok saya Nuruzzahari, dan terakhir adek cewek saya Nanda Fitria. Semoga skripsi ini dapat menjadi bukti nyata dari semua usaha dan doa yang telah kalian curahkan. Dengan penuh rasa Syukur, saya persembahkan karya ini untuk kalian, sebagai ucapan cinta dan terima kasih yang mendalam.

7. Terimakasih juga kepada karyawan Baitul Mal Aceh yang telah membantu memberikan data untuk penulis skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Banda Aceh, 11 januari 2025

AR - RANIRY Penulis,

Lisa Saputri

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauḷa
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-ḷukira
يَذْهَبُ	-yaḷhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يُقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūḷah

Transliterasi untuk *tā' marbūḷah* ada dua:

a) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu'ima*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّا	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَيْتِهِ مَبْرُكَةٌ

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramadān al-laḏi unzila fih al Qur'ānu*

-*Syahru Ramad ānāl-laḏi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ فَتَحَ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah pegawai pada Sekretariat Baitul Mal Aceh pada Tahun 2023	5
Tabel 3.1 Penetapan Pembagian Bidang Kerja Karyawan PNS dan non-PNS pada penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh.....	55
Tabel 3.2 Perbandingan Tugas Pokok dan Fungsi ASN dan non- ASN	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	79
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	80
Lampiran 3: Surat Balasan Permohonan Melakukan Penelitian	81
Lampiran 4: Protokol Wawancara.....	82
Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara	84



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA KONSEP KINERJA PNS DAN TENAGA KONTRAK MENURUT PP NO. 17 TAHUN 2020 DAN TANGGUNG JAWAB ‘AMIL PADA PENYALURAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH.....	22
A. Konsep Kinerja PNS dan Tenaga Kontrak Menurut PP No. 17 Tahun 2020	22
1. Pengertian Kinerja PNS dan Tenaga Kontrak Menurut PP No. 17 Tahun 2020.....	22
2. Sistem Penetapan Kerja dan <i>Job Desk</i> Bagi PNS dan Tenaga Kontrak.....	25
3. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja PNS dan Tenaga Kontrak Menurut PP No.17 Tahun 2020.....	27
B. Ketentuan Kinerja ‘ <i>Amil</i> dalam Pengelolaan Zakat.....	29
1. Pengertian ‘ <i>amil</i> dalam Pengelolaan Zakat.....	29
2. Persyaratan ‘ <i>amil</i> dalam pengelolaan zakat	31
3. Tanggung jawab ‘ <i>amil</i> dalam Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh	35

BAB TIGA PERBANDINGAN PNS DAN TENAGA KONTRAK PADA BEBAN KERJA DALAM PENYLAURAN ZAKAT BAITUL MAL ACEH MENURUT PP NO. 17 TAHUN 2020	40
A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh	40
B. Penetapan Tugas dan Pekerjaan dalam Pengelolaan Zakat di Bagian Baitul Mal Aceh.....	46
C. Perbandingan Tugas Pokok dan Fungsi Pekerja dalam Penyaluran Zakat di Bagian Baitul Mal Aceh.	58
D. Tinjauan Konsep ' <i>Amil</i> pada Pelaksanaan Pekerjaan PNS dan Pegawai Kontrak dalam Penyaluran Zakat di Baitul Mal Aceh .	64
BAB EMPAT PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang mengelola zakat yang harus disalurkan kepada *mustahiq*. Untuk seluruh operasional, baitul mal sangat mengandalkan kinerja dari para pegawai baitul mal yang terdiri dari PNS dan tenaga kontrak. Dalam menjalankan tugasnya, Baitul Mal Aceh memiliki 4 unsur pekerja yaitu PNS, tenaga kontrak, relawan *'amil*, dan *'amil* tidak tetap.

'Amil pada pelaksanaan pekerjaan di Baitul Mal Aceh bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat, termasuk zakat fitrah, zakat mal, dan zakat *kafarat*. *'Amil* juga bertugas untuk mengelola dana zakat yang dikumpulkan, termasuk pengelolaan keuangan dan investasi yang sesuai dengan hukum. Lalu menyalurkan dana zakat ke berbagai program dan lembaga yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Serta menyediakan laporan, informasi yang jelas tentang penggunaan dana zakat kepada masyarakat. Pelaksanaan ketentuan *'amil* di Baitul Mal Aceh diatur dalam Qanun Nomor 3 tahun 2021 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.

Untuk meningkatkan kinerja penyaluran zakat pada Baitul Mal Aceh maka perlu adanya langkah-langkah yang konkret dalam pengawasan dan transparansi serta efisiensi operasional dalam penyaluran zakat, agar dapat memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat, adil dan memberikan dampak sosial yang signifikan. Dengan begitu upaya-upaya ini akan membantu memastikan bahwa zakat Baitul Mal Aceh dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran zakat oleh PNS dan non-PNS sebagai *job desk* yang ditetapkan oleh unit kerja yang harus dilakukan secara rutin berdasarkan program kerja yang

ditetapkan berdasarkan tahun anggaran yang akan dan/atau sedang berlangsung. *Team* yang terdiri dari PNS dan non-PNS bekerja sama untuk mengidentifikasi penerima zakat setelah *mustahiq* menerima zakat yang ditetapkan, selanjutnya tim Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan lembaga *'amil* zakat untuk mengkoordinasikan penyaluran dana. Dengan teliti, tim kolaboratif mengumpulkan dan mendokumentasikan data penerima zakat serta kebutuhannya secara rinci. Setelah penyaluran selesai, *team* ini akan membuat laporan tentang hasil penyaluran zakat kepada pimpinan unit kerja dan pihak terkait lainnya. Laporan ini tidak hanya untuk pertanggungjawaban, tetapi juga untuk evaluasi dan *monitoring* agar penyaluran zakat dapat ditingkatkan di masa mendatang.

Pendapat ulama terhadap penyaluran zakat memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan pemahaman tentang penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan pengawasan yang ketat maka dapat memastikan bahwa penyaluran zakat dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan PNS dan pegawai kontrak pada penyaluran zakat Baitul Mal Aceh diterangkan melalui peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan perlindungan bagi PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai kontrak, termasuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, termasuk mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi pekerja dalam menjalankan tugasnya dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan zakat di Aceh, termasuk aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan perlindungan hukum bagi para pekerja Baitul Mal Aceh. Peraturan-peraturan tersebut

menetapkan, bahwa pengelolaan zakat dan hibah adalah tugas pemerintah dan wajib dijalankan oleh pemerintah daerah dengan bantuan para ulama dan akademisi. Dalam hal ini, pemerintah Aceh memiliki lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya yang dikeluarkan oleh umat muslim di Aceh.

Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan PNS dan pegawai kontrak pada penyaluran zakat Baitul Mal Aceh juga diterangkan melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau Perjanjian Kerja Permanen (PKP) yang diterima oleh para *'amil* non-PNS. P3K adalah unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) di samping PNS, dan skema kepegawaian ini dianggap lebih cocok untuk Baitul Mal Aceh karena akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan zakat dan dana dengan jaminan *job security* bagi *'amil* non-PNS, supaya memiliki motivasi dan komitmen yang lebih tinggi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan memastikan stabilitas dan kontinuitas pengelolaan yang diperlukan dalam pengelolaan zakat dan dana.¹

Dengan dasar hukum tersebut, PNS dan non-PNS pada Baitul Mal Aceh memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. PNS umumnya memiliki gaji dan tunjangan yang lebih tinggi dibandingkan non-PNS. Selain itu PNS juga memiliki hak pensiun, perbedaan status ini dapat berimplikasi pada efektivitas dan keadilan dalam penyaluran zakat. PNS yang memiliki gaji dan tunjangan yang lebih tinggi, mungkin tidak memiliki motivasi yang sama tinggi dengan non-PNS untuk bekerja secara maksimal dalam penyaluran zakat.

Efektivitas penyaluran zakat pada kinerja dipengaruhi pada tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penyalurannya. Selain itu, penting juga untuk menegakkan standar profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat, keterlibatan aktif masyarakat, memilih program-program yang tepat serta pengawasan dan evaluasi yang cermat terhadap program yang didanai oleh zakat.

¹ Arif Arham, *'amil P3k Untuk Baitul Mal Aceh*, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/'amil-p3k-untuk-baitul-mal>, diakses pada Tanggal 15 Mei 2023.

Dengan demikian, lembaga pengelola dan panyaluran zakat dapat memastikan bahwa dana yang di salurkan memberikan manfaat bagi para *mustahiq* dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat.

Perbedaan perlakuan antara PNS dan non-PNS dalam melakukan pekerjaan dapat mengakibatkan inefisiensi serta ketidakadilan dalam kinerja pengelolaan dan penyaluran zakat pada Baitul Mal Aceh. Meskipun PNS menerima gaji dan tunjangan yang lebih tinggi, hal ini tidak selalu mencerminkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-PNS. Situasi ini berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya dan ketidakadilan bagi non-PNS yang mungkin bekerja dengan lebih keras namun menerima kompensasi yang lebih rendah. Hal inilah yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini untuk melihat sistem kerja, produktivitas dan *output* yang dihasilkan dari dua kategori pekerja formal pada pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh.

Tahun 2023 Baitul Mal Aceh memiliki 1 orang pemimpin dan mempunyai 57 karyawan wanita serta 64 karyawan laki-laki dengan keseluruhan karyawan berjumlah 121 karyawan. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMA), Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), Strata 3 (S3). Karyawan yang memiliki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 10 orang, karyawan yang memiliki jenjang Diploma berjumlah 11 orang, karyawan yang memiliki jenjang Strata 1 (S1) berjumlah 64 orang, karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 33 orang, dan karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 3 orang. Jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan menunjukkan posisi karyawan tersebut sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing karyawan.

Pada Baitul Mal Aceh, dalam melaksanakan tugas harian, Pimpinan Baitul Mal Aceh dibantu oleh *'amil* Baitul Mal Aceh yang terdiri dari sekretariat, tenaga profesional, tenaga kontrak, *'amil* relawan, dan tenaga pendamping dengan status kepegawaian terdiri atas PNS dan non-PNS. Sesuai dengan Qanun Aceh No. 3

Tahun 2021 tentang Baitul Mal, Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian pada tingkat Provinsi Aceh. Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan tenaga PNS Pemerintah Aceh yang terdiri atas Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan staf. Sementara itu, tenaga profesional, tenaga kontrak, *'amil* relawan, dan tenaga pendamping tidak tetap adalah tenaga non-PNS yang membantu dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh. Rincian tugas dan beban kerja untuk tenaga profesional tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Badan Baitul Mal Aceh dan untuk *'amil* relawan serta tenaga pendamping tidak tetap tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat BMA.² Jumlah *'amil* Baitul Mal Aceh per 30 Juni 2023 adalah sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah pegawai pada Sekretariat Baitul Mal Aceh pada Tahun 2023

No	Unsur	Jumlah
1	DPS BMA	5
2	Badan BMA	5
3	Sekretariat	31
4	Tenaga Profesional	15
5	Tenaga kontrak	30
6	<i>'amil</i> Relawan	25
7	Tenaga Pendamping Tidak Tetap	10
TOTAL		121

Sumber Data: Profil Baitul Mal Aceh 2023

Selain itu, *'amil* relawan zakat atau biasa disebut tenaga profesional yang berperan penting dalam mendukung kegiatan penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh. *'Amil* relawan zakat ini terbagi ke dalam 5 unit kerja, yaitu unit fakir udzur,

² Profil Baitul Mal Aceh 2023, Baitul mal go.id, <https://baitulmal.acehprov>. Di akses pada Tanggal 2 Mei 2024

unit beasiswa, unit *counter* pendayagunaan, unit *counter* pengumpulan, dan unit ZIS produktif. *'Amil* ini telah aktif sejak tahun 2013 dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas penyaluran, pengumpulan terhadap *mustahiq* maupun *muzakki*, serta memastikan program pendampingan tingkat bawah berjalan sesuai harapan.³

Dengan adanya kerjasama antara PNS, pegawai kontrak, dan relawan *'amil* zakat, Baitul Mal Aceh dapat menjalankan program penyaluran zakat dengan lebih efektif dan efisien. Meskipun sumber daya manusia yang kompeten masih terbatas, namun dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan kegiatan penyaluran zakat dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam pelaksanaan pekerjaan tanpa diskriminasi antara PNS dengan non-PNS, maka perlu dibuat kebijakan yang memastikan bahwa PNS dan non-PNS mendapatkan perlakuan yang sama dalam kesempatan, penghargaan, menyediakan pelatihan dan pengembangan yang inklusif untuk kedua kelompok pekerja, sehingga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan, dan menggunakan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja sehingga mencapai efisiensi dan keadilan dalam pelaksanaan pekerjaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan kepuasan dalam bekerja.

Dengan iklim kerja yang dikotomis antara dua kelompok pekerja ini, penulis akan meneliti tentang produktivitas pekerjaan yang dihasilkan oleh pekerja PNS dan non-PNS dalam pelaksanaan pekerjaan untuk penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh, dan menganalisisnya menggunakan konsep fiqh sebagai sebuah tanggung jawab yang harus direalisasikan seluruh *stake holders* dan staf di lingkungan Baitul Mal Aceh dalam penyaluran zakat sebagai *'amil* yang telah dibebankan pekerjaan tersebut.

³Profil Baitul Mal Aceh 2023, Baitul mal go.id, <https://baitulmal.acehprov>. Di akses pada Tanggal 2 Mei 2024, hlm 6.

Pembahasan yang telah penulis paparkan ini menegaskan mengenai tantangan dan potensi perbaikan dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh. Dari perbedaan perlakuan antara PNS dan non-PNS hingga keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, terlihat bahwa ada ruang bagi perbaikan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam pelaksanaan tugas ini. Dengan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk PNS, pegawai kontrak, dan relawan *'amil* zakat, serta komitmen untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif, meningkatkan sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fiqh Islam, kita memiliki kesempatan untuk mengatasi tantangan ini.

Melalui upaya bersama ini, penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh bisa terus meningkat untuk warga yang memerlukan, dan menguatkan keyakinan warga terhadap lembaga pengelolaan zakat yaitu Baitul Mal Aceh ini.

B. Rumusan Masalah

Dalam riset ini penulis menegaskan permasalahan yang akan menjadi kajian untuk dianalisis sehingga menghasilkan kajian yang relevan dengan bidang studi penulis sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah akademis. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu:

1. Bagaimana penetapan tugas dan pekerjaan pada pengelolaan zakat terhadap masing-masing bagian di kalangan staf PNS dan non-PNS di Baitul Mal Aceh?
2. Apakah tugas pokok dan fungsi para pekerja pengelolaan zakat dari kalangan ASN dan non ASN seperti tenaga kontrak, *'amil* relawan dan *'amil* pendamping tidak tetap di Baitul Mal Aceh dibagi sama rata?
3. Bagaimana tinjauan konsep *'amil* terhadap pelaksanaan pekerjaan PNS dan pegawai kontrak pada penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis proses penetapan tugas dan pekerja dalam pengelolaan zakat di kalangan staf PNS dan non-PNS supaya memahami perbedaan dan kesamaan dalam tanggung jawab serta peran mereka dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk meneliti tugas pokok dan fungsi para pekerja pengelolaan zakat dari kalangan ASN dan non ASN seperti tenaga kontrak, *'amil* relawan dan *'amil* pendamping tidak tetap di Baitul Mal Aceh dibagi sama rata.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *'amil* terhadap pelaksanaan pekerja PNS dan pegawai kontrak dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh supaya memahami persepsi mereka terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja serta kontribusi keduanya dalam proses tersebut.

D. Penjelasan Istilah

Dalam menjelaskan operasional variabel serta mengarahkan penelitian, penting bagi penulis untuk merinci dan menggambarkan dengan menjelaskan makna dari istilah-istilah yang tertera dalam judul penelitian ini. Maka dari itu, penulis merasa penting untuk mengkaji dan menggali lebih dalam tentang konsepsi masing-masing istilah sebagai landasan utama.

1. Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan

Kata realisasi secara definisi dapat diartikan dengan beberapa pengertian. Menurut KBBI di antaranya adalah sebagai proses menjadikan, selain itu realiasi juga di artikan dengan pelaksanaan yang nyata, kemudian realisasi juga dapat di artikan cak wujud atau perwujudan⁴.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 2003), hlm. 144.

Makna pelaksanaan pekerjaan pada penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh yaitu untuk menyelesaikan berbagai persoalan pada program-program penyaluran zakat dan infak yang dialokasikan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Maka Baitul Mal Aceh menyadari bahwa dalam menyelesaikan persoalan umat Islam tidak bisa melakukannya sendiri secara tunggal, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dan sinergisitas dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan setiap program yang dijalankan di lapangan.

2. Penyaluran zakat

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun non-material, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak yang lainnya maupun ke berbagai pihak.

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengertian dari penggabungan Penyaluran dan Zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku⁵.

3. Baitul Mal

Baitul mal berasal dari Bahasa Arab yaitu *bait*, yang berarti “rumah”, dan *al-mal*, yang berarti “harta”. Baitul mal berarti rumah tempat mengumpulkan atau menyimpan harta. Secara istilah, baitul mal adalah sebuah lembaga (*al-jihat*) yang memiliki misi khusus untuk mengumpulkan semua kekayaan rakyat dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran negara.

⁵ Kharis & Abdul, “Analisis penyaluran zakat melalui program pendidikan dan dampaknya terhadap para mustahiq (studi kasus di Rumah Zakat Semarang).” *thesis*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.2014. hlm. 19.

Baitul mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola berbagai kekayaan yang menjadi penerimaan negara.⁶

Lembaga tersebut merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada masa Nabi Muhammad Saw. Padahal keberadaan lembaga ini lebih populer di era *Khulafaur Rasyidin*. Pada awalnya, lembaga tersebut hanya digunakan untuk menyimpan kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan rampasan perang.

4. Pegawai Kontrak/ Amil Relawan/Amil pedamping

Pegawai kontrak/'*amil* relawan, '*amil* pedamping merupakan orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum untuk mengurus zakat. Tugas utama pegawai kontrak/'*amil* relawan, '*amil* pendamping meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat⁷. Mereka hanya memperoleh ganjaran atas pekerjaan yang dilakukannya itu, menurut Al-Nawawi.⁸ Mereka berhak menerima ganjaran yang setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan baik banyak atau sedikit dari ukuran *seperdelapan* yang diperuntukkan kepada '*amil*. '*Amil* dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak, '*amil* relawan dan '*amil* pendamping.

5. PNS (Pegawai Negeri Sipil)

PNS adalah individu yang bekerja di lembaga pemerintahan dan termasuk dalam struktur organisasi pemerintahan yang telah memenuhi syarat, ditentukan, di angkat, dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara

⁶ Hayatullah Zuboidi, dkk, *Rekam Jejak Dua Windu Baitul Mal Aceh*, Gran Aceh Hotel, Banda Aceh, 2023. hlm. 1.

⁷ Ahmad Hudaifah, dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Jl. Kebonsari Tengah No.03, Surabaya. 2020, hlm. 1.

⁸ An-nawawi, Al-Majmu', *Kairo, Mesir: Matba'ah al-imam, t.t., Jld. 6*, al-*Dasuqi*, Hasyiah: al-Hanbali, hlm. 195.

nasional oleh pejabat pembina kepegawaian serta mendapatkan mandat tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara yang kemudian disebut ASN.

Tugas PNS pada penyaluran zakat untuk tenaga kontrak meliputi pengelolaan dan penyaluran zakat serta kebijakan terkait tenaga kontrak di instansi pemerintah. Mereka terlibat dalam proses pengumpulan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh. Selain itu, PNS juga terlibat dalam kebijakan penghapusan tenaga kontrak di Baitul Mal Aceh, seperti melakukan pendataan tenaga non-PNS dan menyikapi kebijakan tersebut. PNS juga berperan dalam proses pengalihan tenaga honorer menjadi calon PNS di lingkungan pemerintah daerah.⁹ Dengan demikian, tugas PNS pada penyaluran untuk tenaga kontrak melibatkan manajemen zakat dan kebijakan terkait tenaga kontrak di instansi pemerintah.

6. Beban kerja

Beban kerja adalah sebuah proses yang dilakukan/dibebankan pada seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan atau kelompok jabatan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan dilaksanakan dalam kondisi normal. Beban kerja timbul akibat dari keterbatasan kapasitas dalam mengakses berbagai informasi. Ketika menjalankan tugas, individu akan mampu menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan pada tingkatan tertentu. Jika keterbatasan yang ada pada individu dirasa menjadi kendala tercapainya hasil kerja yang diharapkan, hal tersebut menandakan terdapat kesenjangan pada kemampuan yang diharapkan dengan kapasitas individu.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiasi, di dalam tulisan penelitian ini, melalui tema maupun judul yang diajukan oleh peneliti,

⁹ Zulpikar, *Analisis Kebijakan Ahli Madya*, Puslatbang PKASN, 8 juli 2022, di akses pada Tanggal 2 Mei 2024.

¹⁰ Cholishoh, Amna (2021) *Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan: Studi Kasus PT. Indoexim Internasional, Undergraduate (S1) Thesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. hlm. 17.

maka kajian pustaka yang akan dikaji atau ditelaah oleh peneliti yaitu tentang realisasi pelaksanaan pekerjaan pada penyaluran zakat Baitul Mal Aceh menurut PP No. 17 Tahun 2020, penelitian ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara kinerja PNS dan pegawai kontrak di Baitul Mal Aceh terutama pada beban kerja dalam melakukan berbagai kegiatan yang menjadi beban kerjanya. Maka peneliti akan melakukan riset lebih lanjut tentang kinerja dan realisasinya yang dilakukan oleh PNS dan pegawai kontrak, terutama tentang efektivitas dan keadilan pelaksanaan pekerjaan pada realisasi program penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jasafat (2015) dalam sebuah jurnal *Al-ijtimayyah* yang berjudul “*Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar*”.¹¹ Jurnal tersebut memaparkan pola manajemen zakat yang diterapkan pada Baitul Mal Aceh Besar, yaitu secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahannya serta pengawasan.

Perbedaannya ialah penelitian ini mengkaji mengenai manajemen zakat yang diterapkan pada Baitul Mal Aceh Besar. Sedangkan penulis mengkaji kinerja PNS dan non PNS di Baitul Mal Aceh dengan sistem pengelolaan zakat yang mengacu pada undang-undang pengelolaan Zakat. Persamaan penelitian ini ialah, sama-sama membahas pelaksanaan, pengarahannya dan pengawasan pada pekerjaan penyaluran zakat di Baitul Mal.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Zulhamdi (2017) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe dalam sebuah jurnal yang

¹¹ Jasafat, “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar”, *Al Ijtimaiyyah*, Vol. 1, No. 1, 2015.

berjudul “*Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh.*”¹² Jurnal ini memaparkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga yang bertugas menghimpun zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada yang kurang mampu.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi di masa kini yang didasarkan pada gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik data dari lapangan maupun berupa teori, konsep dari buku yang terkait dengan topik masalah yang sedang diselidiki hasil penelitian berupa permasalahan yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat, kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai Baitul Mal Aceh, kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap Baitul Mal Aceh, adanya isu zakat kekinian *khilafiah* di mana sebagian ulama tidak setuju dengan penetapan pendapatan gaji sebagai zakat, mereka lebih setuju dengan infak, masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap baitul mal, dan masih minimnya data *mustahiq*, serta belum populernya konsep zakat produktif di kalangan *mustahiq*.

Penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis kaji terkait dengan kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai Baitul Mal Aceh. Namun penelitian di atas juga terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu penelitian ini hanya menjelaskan kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai Baitul Mal Aceh. Sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu perbandingan pegawai PNS dan kontrak pada beban kerja di Baitul Mal Aceh.

Ketiga, Rauzatul Mulia (2019) dengan judul penelitian “*Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.*”¹³ Penelitian

¹² Zulhamdi, “Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh,” *Skripsi*, (Lhokseumawe: Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2017).

¹³ Rauzatul Mulia, “Strategi Pengelolaan Zakat Pada Kabupaten Aceh Tamiang,” *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif-dekriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang telah menerapkan dengan baik sistem pengelolaan zakat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dalam melakukan pengelolaan zakat. Namun Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang juga mengalami beberapa kendala yaitu terbatasnya ‘*amil* pada lembaga tersebut dan kurangnya kejujuran dari penerima manfaat tersebut.

Perbedaannya ialah penelitian ini memaparkan tentang kurangnya kejujuran dari penerima manfaat dalam pengelolaan zakat, sedangkan persamaan dengan penelitian dan penulis kaji terkait pada pegawai ‘*amil* pada lembaga Baitul Mal.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat (2016) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Zakat di Badan ‘amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*".¹⁴ Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Badan ‘amil Zakat Kabupaten Kulonprogo masih belum efektif, ini dilihat dari beberapa hal yaitu: (1) dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyalurannya pun terbatas, (2) pendayagunaan zakat produktif baru diterapkan pada beberapa dusun-dusun tertentu, (3) ‘amil tidak terlalu fokus dalam mengelola zakat, (4) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga walaupun Badan ‘amil Zakat Kabupaten Kulonprogo telah berdiri sejak tahun 2009, namun pada kenyataannya belum ada perubahan yang signifikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat yang ada pada Badan

¹⁴ Rahmat Hidayat, "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan ‘amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

'amil Zakat. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah, (1) penelitian penulis dilakukan pada Baitul Mal Aceh, (2) penelitian penulis lebih mengarah pada bagaimana tugas pokok dan fungsi para pekerja pengelolaan zakat dari kalangan ASN dan non ASN di Baitul Mal Aceh.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Zulhamdi (2016) dalam sebuah jurnal Hukum & Ekonomi Syariah yang berjudul "*Urgensi Lembaga 'amil Zakat & Perkembangannya di Aceh*".¹⁵ Jurnal tersebut menjelaskan tentang perkembangan regulasi zakat di Aceh, eksistensi Baitul Mal dikalangan masyarakat khususnya dalam hal pengelolaan zakat dan juga kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal baik dari kalangan masyarakat Aceh sendiri maupun dukungan politik.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah bahwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan objek penelitian pada Lembaga 'amil zakat di Baitul Mal Aceh tentang bagaimana Urgensi Pelaksanaan Penyaluran zakat PNS dan Non PNS pada beban kerja. Persamaan penelitian dengan penulis ialah sama-sama mengkaji perkembangan regulasi Lembaga 'amil zakat di Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dibutuhkan untuk menghasilkan penelitian ilmiah yang memenuhi standar riset yaitu logis, sistematis, dan empiris. Dengan penggunaan metode penelitian maka dapat dipastikan hasil yang akan dicapai pada riset tersebut sesuai dengan tujuan penelitian, terutama dengan mengikuti prosedur dan tahapan dari proses penelitian. Untuk memastikan objektivitas dan validitas data yang dihasilkan pada riset ini, maka berikut ini penulis paparkan tahapan-tahapan prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

¹⁵ Zulhamdi, Urgensi Lembaga 'amil Zakat & Perkembangannya di Aceh, *Al-Muamalat Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. II, No. 1, 2016.

Pendekatan penelitian adalah cara berfikir yang akan penulis lakukan pada penelitian ini sebagai proses awal dari riset untuk memastikan alur dan cara berfikir secara logis sesuai dengan konsep dan data yang dibutuhkan. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, melalui penetapan ketentuan hukum yang diatur dalam sistem hukum positif tentang persoalan yang dibahas dan mengkombinasikannya dengan ketentuan dan norma hukum dalam fiqh muamalah.

Bentuk pendekatan *yuridis-empiris* dalam riset ini penulis akan menganalisis sistem kerja PNS dan non-PNS yang ditetapkan dalam ketentuan yuridis dan juga SOP pada Baitul Mal Aceh. Untuk mengkaji aspek ketentuan hukum tentang kinerja Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan regulasinya oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini akan mengeksplorasi kebijakan internal di BMA tentang peran dan tanggung jawab PNS dan non-PNS dalam pelaksanaan pekerjaan penyaluran dana zakat di Baitul Mal Aceh dan Karyawan PNS dan non-PNS bersinergi dan berperan dalam penyaluran zakat. Penulis akan meneliti perbedaan dan persamaan serta membandingkan implementasi dari regulasi ini dengan norma-norma dalam fiqh muamalah, sehingga diperoleh informasi tentang keselarasan atau perbedaan di antara keduanya.

Peneliti akan menganalisis masalah yang diteliti dari sudut pandang hukum yang konkret, menggali kedalaman realitas sosial, menciptakan jalan yang khas dan tepat dalam merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, diperlukan prosedur yang komprehensif untuk memperoleh data yang objektif dan faktual sebagai syarat untuk memastikan validitas data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis

penelitian deskriptif analisis dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta-fakta tentang objek penelitian secara nyata melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.¹⁶

Jenis penelitian deskriptif analisis akan dipaparkan dan digambarkan tentang kinerja PNS dan tenaga kontrak pada penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh, penggambaran yang dilakukan mencakup sistem dan cara kerja, dinamikanya dan proses sehingga akan terlihat perbedaan, keselarasan dan sinergisitasnya antara PNS dan Non PNS.

Fokus utama penggunaan jenis penelitian deskriptif ini untuk memahami relasi kedua kelompok pekerja dari kalangan PNS dan tenaga kontrak berkontribusi pada kinerja dan efektivitasnya pada pengelolaan zakat yang mencakup penyaluran zakat, pendataan, pelaporan dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan oleh manajemen Baitul Mal Aceh. Melalui prosedur penelitian deskriptif analisis, penelitian ini memperoleh informasi yang komprehensif dan valid mengenai perbedaan beban kerja antara PNS dan tenaga kontrak dalam penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh.

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen sumber daya manusia di Baitul Mal Aceh, serta meningkatkan efektivitas program penyaluran zakat untuk mencapai tujuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti untuk dijadikan pedoman agar memperoleh data yang valid dan akurat terkait kinerja dan realisasinya yang dilakukan oleh PNS dan pegawai kontrak, terutama tentang efektivitas dan keadilan pelaksanaan pekerjaan pada

¹⁶ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia indonesia, 2011.). hlm. 3

realisasi program penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh meliputi sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu bentuk data yang diperoleh dalam bentuk informasi secara langsung dari responden yang penulis tetapkan.¹⁷ Dalam riset ini, data yang diperoleh penulis langsung dari pengurus Baitul Mal Aceh, sebagai realisasi pelaksanaan pekerjaan penyaluran zakat yang dilakukan oleh PNS dan pegawai kontrak.

b. Data sekunder

Data sekunder sebagai data yang diperoleh dari kepustakaan dan data-data pelengkap dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, situs atau dokumen pemerintah yang menjadi referensi terhadap permasalahan yang diteliti dalam riset ilmiah.¹⁸ Pada penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan adalah buku, jurnal, website terkait serta laporan-laporan atau dokumen pemerintah yang memiliki relevansi terhadap masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggali dengan kegiatan Tanya-jawab secara lisan dan tulisan untuk memperoleh informasi.¹⁹ Teknik wawancara yang dimaksud adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat guna

¹⁷ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Cet. Psertama), hlm. 28.

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, 2004, hlm.

memecahkan masalah tertentu sesuai data yang diperoleh. Dalam teknik ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden, yang memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan sub-bagian hukum, kepegawaian dan umum di Baitul Mal Aceh. Metode yang digunakan adalah *quidance interview* yang merupakan serangkaian pertanyaan lisan yang diarahkan pada permasalahan yang telah terstruktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data berupa dokumen-dokumen yang belum dipublikasikan sama sekali digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film gambar, dan karya-karya monumental.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kegiatan, pedoman operasional, atau evaluasi kinerja. Dengan cara ini peneliti akan memperoleh data yang sudah tersusun dan terdokumentasi mengenai realisasi pelaksanaan tugas PNS dan pegawai kontrak.

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data adalah suatu proses yang dijalankan oleh peneliti guna mengolah data yang telah didapatkan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang telah diformulasikan dalam rumusan masalah, berdasarkan data yang valid dan objektif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan *juridis-empiris*. Data yang akan dianalisis adalah jumlah dan jenis tugas yang dilakukan oleh PNS dan pegawai kontrak, jumlah zakat yang disalurkan, tingkat keberhasilan program

²⁰ Muh Fitrah, Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus), (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 74.

dalam mencapai target penyaluran zakat yang disalurkan dan waktu dalam penyelesaian tugas yang diberikan yang mencakup perbandingan antara PNS dan kontrak dalam beban kerja. Untuk memperoleh hasil akhir yang faktual, diperlukan analisis yang kritis dan analitis.

6. Pedoman Penulisan

Untuk meraih kesempurnaan dalam penyusunan penelitian agar sesuai dengan norma-norma ilmiah, penulis meneladani Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, serta merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan penulis juga mengikuti arahan dari berbagai sumber yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketetapan pemerintah, literatur fiqih muamalah yang membahas tentang Baitul Mal Aceh, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait. Dengan berpegang teguh pada pedoman-pedoman itu, penulis bertekad menyusun karya ilmiah yang terstruktur, berlandaskan pada ilmu pengetahuan, dan dapat diserap dengan mudah oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini perlu diperinci agar memudahkan proses penyusunan dan pemahaman yang mendalam. Penulisan ini terstruktur dalam empat bab, masing-masing dengan sub-bab yang saling terkait erat. Sistematika penulisan yang tergambar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu yang merupakan pendahuluan. Bab ini bertindak sebagai pengantar dari keseluruhan karya, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pembahasan yang akan diuraikan dalam skripsi ini. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua yang merupakan landasan teori. Bab ini memaparkan kajian teoritis tentang tinjauan umum landasan teori terkait realisasi kinerja pada penyaluran zakat Baitul Mal Aceh menurut PP No. 17 Tahun 2020 (perbandingan antara PNS dan kontrak dalam beban kerja). Di dalamnya termuat pemahaman tentang konsep dan peraturan terkait penyaluran zakat, serta analisis perbandingan antara pekerja PNS dan kontrak dalam pelaksanaan tugas.

Bab tiga yang merupakan pembahasan hasil penelitian. Bab ini mempersembahkan hasil penelitian yang telah diselidiki, mulai dari deskripsi kasus hingga analisis hukum terkait realisasi perbandingan pelaksanaan pekerjaan/kinerja PNS dan pegawai kontrak pada penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh. Hal ini termasuk pemahaman atas peran serta dan tanggung jawab masing-masing jenis pekerja dalam menjalankan tugasnya.

Bab empat yang merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan, serta saran yang berkaitan dengan penelitian, penulisan, dan penyusunan skripsi ini.

